

IDENTIFIKASI NILAI MULTIKULTURALISME DALAM BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KURIKULUM 2013

Uun Lionar

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Padang

lionaruun799@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a multicultural country in which there are various ethnic, tribal, religious, and cultural elements spread out on various islands. In order to maintain the diversity from the nation disintegration threat, it is needed to have a conceptualized strategy through various aspects of life. With respect to the field of education, the concept of multicultural is internalized through the learning materials contained in the textbook. The textbook of history subject is basically set up by the government of the Republic of Indonesia in order to convey a message of values which is relevant to Pancasila as the nation's ideology. In regard to this nation's ideology, multiculturalism in fact is considered as one of its values. Through this study, the writer will then analyze the textbook of Indonesian History subject of class X, in the first semester based on the curriculum of 2013, by identifying the values of multiculturalism contained within this aforementioned textbook. This book consists of two chapters. In particular, the first chapter discusses the materials on the spread of early civilizations in the Indonesian archipelago, and the second chapter covers the trades, rulers, and poets in the classical period (Hinduism-Buddhism). This present study employed a qualitative approach with a syntagmatic discourse analysis method, specifically using a constructivism paradigm. In particular, this method attempted to find out various facts behind a script in which one of them also included ideological and political elements. With respect to the use of constructivism paradigm, it was also used to discover something in the form of feelings / desires of the script maker. Based on the carried-out analysis, the writer found several paragraphs that implicitly contained the values of multiculturalism. The value was conveyed through various instances in the historical events. Therefore, the writer concluded that in the textbook of Indonesian History subject of Class X in the first semester, the curriculum of 2013 contained the values of multiculturalism. Although it was not explicitly stated, the ideas of multiculturalism should be reaffirmed by the teacher during the learning processes.

Keywords: *Multiculturalism, Historical Learning, Textbook, Curriculum of 2013*

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah bangsa yang multikultural dimana di dalamnya terdapat berbagai unsur etnis, suku, agama, dan budaya yang bersebaran di berbagai pulau. Untuk merawat agar keberagaman tersebut tidak menjadi ancaman disintegrasi bangsa dibutuhkan strategi yang terkonseptualisasi melalui berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan konsep multikultural diinternalisasikan melalui materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku teks pelajaran. Buku teks mata pelajaran sejarah pada dasarnya disusun oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka untuk menyampaikan pesan nilai yang relevan dengan ideologi bangsa yakni Pancasila, salah satu nilai tersebut adalah multikulturalisme. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis buku teks pelajaran Sejarah Indonesia kelas X semester I (pertama) berdasarkan kurikulum 2013, dengan mengidentifikasi nilai multikulturalisme yang terkandung di dalamnya. Buku ini terdiri dari dua bab, bab pertama memuat materi mengenai persebaran peradaban awal di kepulauan Indonesia, dan bab kedua mengenai perdagangan, penguasa dan pujangga pada masa klasik (Hindu-Budha). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana (discourse analysis) sintagmatis yang berparadigma konstruktivis, yaitu metode penelitian yang mencoba menemukan berbagai fakta di balik sebuah naskah yang salah satunya juga termasuk unsur ideologis dan politis. Penggunaan paradigma konstruktivis juga untuk menemukan sesuatu yang menjadi perasaan/keinginan pembuat naskah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa paragraf

yang secara implisit mengandung nilai multikulturalisme. Nilai tersebut disampaikan melalui berbagai contoh dalam peristiwa sejarah. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam buku teks pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X semester I (pertama) kurikulum 2013 terkandung nilai multikulturalisme. Walaupun tidak tersampaikan secara eksplisit, hal demikian harus ditegaskan kembali oleh guru dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: Multikulturalisme, Pembelajaran Sejarah, Buku Teks, Kurikulum 2013.

PENDAHULUAN

Model kebangsaan Indonesia didasarkan pada konsep suatu bangsa Indonesia yang tunggal. Terbentuk dari berbagai suku yang tersebar di sepanjang kepulauan yang luas, pada mulanya ia hanyalah suatu visi guna mendirikan pemerintahan baru yang akan menyatukan kelompok-kelompok yang berlainan etnis (Bertrand, 2012, hlm. 47). Fakta menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki semua syarat dan sifat untuk tidak bersatu. Perbedaan dan keragaman kehidupan Indonesia begitu besar sehingga wajar bila terasa sulit untuk hidup bersatu. Akan tetapi, realitas yang tidak dapat dinafikkan oleh siapapun adalah bahwa di atas semua perbedaan dan keragaman itu, Indonesia ternyata bersatu (Buwono X, 2008, hlm. 8).

Lebih lanjut Hamengku Buwono (2008, hlm. 12) menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara besar. Faktor jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, kebhinekaan agama, etnis, dan budaya memberikan peluang untuk itu. Tetapi, perjalanan bangsa ibarat mendaki gunung yang terjal, bahaya selalu mengancam. Tidak saja diperlukan sikap yang berhati-hati tetapi juga kesabaran dan kearifan. Salah satu ancaman disintegrasi bangsa adalah konflik antar etnis.

Menurut Bertrand (2012, hlm. 76-96) sejak republik Indonesia terbentuk catatan kekerasan dan konflik semakin meningkat. Salah satu kasus tersebut adalah konflik antara masyarakat Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, yang berkembang menjadi konflik antar etnis sejak tahun 1996. Terlepas dari berbagai versi dan latar belakang penyebabnya, konflik tersebut telah

menambah daftar panjang ancaman disintegrasi yang bernuansa SARA (Suku, Agama, dan Ras) di tanah air.

Perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan sering disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk/plural (*plural society*), suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda (Nasikun, 2011, hlm. 35). Menurut Furnivall (1944) masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal.

Khusus bagi Indonesia, pasca Perang Dunia ke-2 Furnivall melihat Indonesia dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial budaya yang sarat dengan ancaman perpecahan, khususnya jika negara bangsa Indonesia gagal menemukan “common platform” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu (Mahfud, 2016, hlm. 84). Sejarah pun telah menunjukkan bahwa intervensi pihak Belanda atas pembentukan Indonesia Serikat tentu bertumpu pada semangat kedaerahan atau kesukuan yang masih kental tersebut (Rooseno, 2015, hlm. 47).

Pasca kemerdekaan usaha-usaha dalam mengintegrasikan keragaman telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai aspek kehidupan, mulai dari hal yang berbentuk simbol dan seruan, hingga pada usaha terencana dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan pemerintah telah berusaha mendesain kurikulum pendidikan komprehensif yang salah satu tujuannya adalah untuk merawat keragaman bangsa

melalui pembelajaran di sekolah. Salah satu mata pelajaran yang sangat berperan dalam penanaman nilai pluralitas (multikultural) adalah pendidikan sejarah.

Menurut Mulyana (2009, hlm. 79) pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa. Sedangkan Joebagio (2015) dalam sebuah pengantar mengatakan pendidikan sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai peristiwa masa lalu berupa asal usul, silsilah, pengalaman kolektif dan keteladan pelaku sejarah dengan output yang meliputi pemahaman peristiwa sejarah bangsa, meneladani kearifan, dan sikap bijak pelaku sejarah (Garvey, 2015, hlm. xi).

Pendidikan sejarah memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memahami nilai-nilai luhur bangsa, yang dalam hal ini juga termasuk nilai penghargaan terhadap keberagaman. Keberagaman yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya dapat ditelusuri dan dipelajari melalui materi sejarah yang relevan, sebagai contohnya Soyomukti (2015, hlm. 102) memaparkan pada sejarah zaman pergerakan nasional kesadaran multikultural itu telah dimulai dengan diadakannya Sumpah Pemuda oleh kaum muda dan mahasiswa yang berasal dari berbagai macam organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Bali, Jong Borneo, dan jong-jong lainnya. Dengan demikian, materi pendidikan sejarah sangat relevan untuk menumbuhkembangkan kesadaran multikulturalisme dalam diri siswa. Usaha demikian akan semakin maksimal jika didukung dengan seperangkat media pembelajaran yang memadai, salah satunya adalah buku teks yang relevan.

Buku teks memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tujuan pembelajaran (Mulyana, 2009, hlm. 79). Salah satu aspek penting dalam buku teks adalah bagaimana isi buku teks merepresentasikan tujuan pendidikan melalui wacana tulis yang tertuang berupa teks. Poespoprodjo (1987, hlm. 23) mengatakan bahwa:

“Materi sejarah dalam buku teks merupakan pemikiran dari penulis buku. Sebuah konstruksi pemikiran dalam bentuk tulisan sejarah sudah barang tentu akan menjadi subjektif. Konsep subjektivisme, objek tidak dinilai sebagaimana seharusnya, tetapi dipandang sebagai “kreasi”, konstruksi akal budi. Berpikir disamakan dengan menciptakan, bukan membantu kebenaran keluar dari ketersembunyiannya”.

Pendapat di atas sejalan dengan Aart van Zoest (dalam Sobur, 2002, hlm. 60) yang mengatakan bahwa sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Pernyataan demikian juga didukung Eriyanto (2001, hlm. 13) yang menempatkan ideologi sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini menurutnya karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis akan menganalisis nilai-nilai multikulturalisme yang merupakan karakteristik bangsa Indonesia di dalam buku teks pelajaran Sejarah Indonesia melalui metode analisis wacana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*). Metode analisis wacana menurut Purwoko (2008, hlm. 5-6) pada awalnya digunakan untuk penelitian bahasa dan ilmu linguistik, akan tetapi pada akhir abad ke-20 hampir semua ahli disiplin ilmu sosial dan humaniora telah memanfaatkan kajian wacana ini sebagai perangkat penelitian mereka. Para perintis kajian analisis wacana diantaranya John M. Sinclair dan Malcolm Coulthard (1975), John Gumperz (1982), Michael Stubbs (1983), Gillian Brown dan George Yale (1983), Teun A. van Dijk (1985), dan Deborah Schiffrin (1985).

Analisis wacana adalah satu bagian dari penelitian kualitatif. Analisis wacana merupakan studi tentang struktur pesan

dalam komunikasi, dan lebih tepatnya lagi adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa (Sabor, 2002, hlm. 48). Eriyanto (2001, hlm. 337-341) menerangkan bahwa analisis wacana berbeda dengan analisis kuantitatif, adapun beberapa hal yang membedakannya adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam analisis wacana lebih bersifat kualitatif, analisisnya lebih menekankan pada pemaknaan teks, dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti.

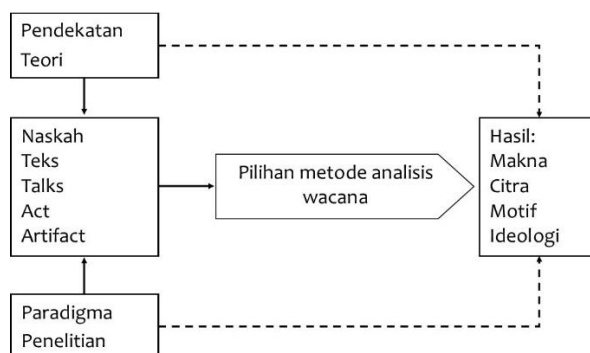
Kedua, analisis isi kuantitatif pada umumnya hanya dapat digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru berpretensi memfokuskan pada pesan laten (tersembunyi).

Ketiga, analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan”, tetapi tidak dapat menyelidiki “bagaimana ia dikatakan” (*how*). Dalam kenyataannya yang penting bukan apa yang dikatakan, akan tetapi bagaimana dan dengan cara apa pesan dikatakan. Keempat, analisis wacana tidak bertujuan melakukan generalisasi dengan beberapa asumsi. Di antaranya setiap peristiwa pada dasarnya selalu bersifat unik, karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama yang diterapkan untuk isu dan kasus yang berbeda. Hamad (2005, hlm. 342) menegaskan bahwa analisis wacana hanya menerangkan kandungan isi naskah dan jika perlu beserta konteks atau historisnya tentang sebuah tema/isu yang dimuat dalam naskah tersebut, dengan demikian hasil penelitian analisis wacana bersifat ideografis.

Menurut Hamad (2005, hlm. 328) berdasarkan penggunaan metode, analisis wacana dibedakan menjadi dua, pertama, analisis wacana sintematis yaitu menganalisis wacana dengan metode kebahasaan dimana peneliti mengeksplorasi kalimat demi kalimat untuk menarik kesimpulan. Kedua, analisis wacana paradigmatis yaitu menganalisis wacana

dengan memperhatikan tanda-tanda tertentu dalam sebuah wacana untuk menemukan makna keseluruhan.

Sedangkan berdasarkan bentuk analisis wacana, terdapat dua bentuk diantaranya: analisis wacana linguistik dan analisis wacana sosial. Di dalam analisis wacana sosial terdapat beberapa paradigma penelitian diantaranya positivis, kritis, konstruktivis, dan partisipatoris. Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis wacana sintematis dengan bentuk analisis wacana sosial yang menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma ini dipandang sesuai untuk menganalisis buku teks pelajaran di sekolah karena peneliti ingin menemukan “fakta lain” di balik naskah yang salah satunya juga termasuk unsur ideologis dan politis. Selain itu, paradigma konstruktivis mencoba menemukan sesuatu yang menjadi perasaan/keinginan pembuat naskah. Adapun teknik penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Proses Analisis Wacana Sosial (Hamad, 2005, hlm. 334)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan dan Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau

kebudayaan saja yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan atau kesetaraan budaya (Mahfud, 2016, hlm. 75).

Secara teoritis pengertian multikulturalisme sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam *politic of recognition* di paparkan oleh Bikhu Parekh (Mahfud, 2016, hlm. 93-95) dalam bukunya *National Culture and Multiculturalisme* (1997), yang secara jelas membedakan lima macam multikulturalisme. Pertama, multikulturalisme isolasionis dimana berbagai kelompok menjalankan hidup secara otonom yang hanya terlibat interaksi satu sama lain. Kedua, multikulturalisme akomodatif dimana kelompok dominan membuat penyesuaian dengan kaum minoritas. Ketiga, multikulturalisme otonomis dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Keempat, multikulturalisme kritis dan interaktif dimana setiap kelompok menuntut kultur kolektif. Kelima, multikulturalisme kosmopolitan dimana paham yang berusaha menghapus batas-batas kultural sehingga setiap individu tidak terikat pada budaya tertentu.

Menurut Soyomukti (2015, hlm. 101) bahwa paham multikulturalisme di Indonesia menjadi semarak kembali setelah masyarakat belajar dari pengalaman pahit dari diterapkannya politik monokulturalisme selama 32 tahun oleh kekuasaan Orde Baru. Salah satu contoh konkret dari praktek monokulturalisme adalah diskriminasi terhadap orang Tionghoa yang berkaitan dengan penyelenggaraan perayaan agama. Pada Januari 2000, presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi presiden nomor 41 tahun 1967 yang kemudian mengakhiri diskriminasi tersebut (Bertrand, 2012, hlm. 166).

Keragaman bangsa bukan saja dalam hal penduduknya dengan berbagai latar belakang keagamaan, suku, orientasi

budaya, tetapi juga dalam arti geografis karena Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia (Sindhunata, 2000: 105). Dalam konteks Indonesia yang multikultural dewasa ini, menurut Sultan Hamengku Buwono X (2008: 14) idiom yang harus dan tetap dijadikan basis integrasi nasional adalah *Bhinneka Tunggal Ika*.

Ia mengatakan pengalaman telah mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan (*tunggal-ika*) yang potensial bisa melahirkan kesatuan dan persatuan, melainkan pengakuan akan pluralitas (*kebhinekaan*), selain itu kesediaan untuk menghormati kemajemukan tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran pendidikan yang berlandaskan semangat multikulturalisme adalah suatu keniscayaan bagi tercapainya kerukunan dalam praktek berbangsa, terkhusus Indonesia.

Pendidikan multikulturalisme pada prinsipnya mengajarkan pada kita tentang pentingnya menjaga harmoni hubungan antar-manusia, meskipun berbeda-beda secara kultural, etnik, religi, dan lain-lainnya. Mahfud (2016, hlm. 230) mengatakan sudah saatnya untuk memperhitungkan faktor kebudayaan sebagai landasan penting dalam menentukan komponen tujuan, materi, proses, evaluasi suatu kurikulum pendidikan. Sebab, apabila kebudayaan merupakan salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman budaya yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi (Zuhdi, 2014, hlm. 308).

Berdasarkan uraian di atas, di bawah ini penulis akan menganalisis bagaimana keselarasan semangat multikulturalisme tersebut tertuang dalam buku teks pelajaran sejarah di sekolah, dengan mengidentifikasi materi yang relevan untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme. Adapun buku yang akan di analisis adalah buku teks pelajaran

Sejarah Indonesia kelas X semester 1. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014, dengan judul sampul Sejarah Indonesia. Buku ini terdiri dari dua bab, diantaranya, Bab pertama: Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia, dan Bab kedua: Perdagangan, Penguasa dan Pujangga pada Masa Klasik (Hindu Budha).

2. Multikulturalisme dalam Buku Teks Sejarah di Sekolah

Salah satu esensi belajar sejarah adalah mengambil nilai-nilai yang relevan dengan konteks kekinian, yang salah satunya adalah multikulturalisme. Di Indonesia konsep multikulturalisme bukan lagi menjadi wacana tetapi sudah menjadi keharus dalam setiap sendi kehidupan masyarakat yang pluralistik. Berikut ini adalah analisa nilai-nilai multikulturalisme dalam materi buku teks pelajaran sejarah Indonesia. Walau tidak diungkapkan secara eksplisit, namun beberapa pernyataan dalam teks menunjukkan adanya keterkaitan teks seperti penggunaan kata dan kalimat yang berkaitan dengan nilai-nilai multikulturalisme.

3. Multikulturalisme dalam Etnis

Buku teks Sejarah Indonesia kelas X semester I (pertama) diawali dengan pembahasan mengenai asal usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis ras yang mendiami daratan Indonesia diantaranya ras Proto Melayu, Deutero Melayu, Melanesia, dan Negrito. Imigrasi ras tersebut berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda. Ras Proto Melayu diperkirakan berasal dari Cina bagian selatan (Yunan), mereka memiliki ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, bermata sipit, dan menempati daerah pantai Sumatra, Kalimantan, Sulawesi Barat.

Ras Deutero Melayu diperkirakan berasal dari Indocina bagian utara, mereka membawa kebudayaan Dongson dan menempati Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Ras Melanesoid terdapat di daerah Papua dan sepanjang lautan Pasifik.

Dan Ras Negrito yang sampai sekarang masih diselidiki asal usulnya. Beragamnya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia kemudian direfleksikan oleh penulis buku bahwa siswa harus mengetahui sejarah persebaran tersebut dan kemudian menghargai atas perbedaan-perbedaan bentuk fisik manusia di berbagai daerah di Indonesia, penjelasan tersebut diuraikan oleh penulis sebagai berikut.

“Bayangkan saja lebih dari 500 suku bangsa Indonesia, sungguh merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun, demikian kekayaan ini akan menjadi masalah jika kita tidak pandai mengelola perbedaan yang ada..... Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keragaman budayanya. Untuk itu kamu harus mempelajarinya, agar kita bisa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 34).

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pentingnya bagi siswa untuk memahami asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pemahaman ini akan berimplikasi pada penghargaan dan penghormatan siswa terhadap perbedaan fisik seperti warna kulit, dan bentuk tubuh manusia Indonesia. Penulis juga menerangkan agar siswa “pandai mengelola perbedaan”, yang artinya bahwa output dari pembelajaran sejarah adalah siswa akan memahami perbedaan etnis terutama dilingkungannya sendiri dan berusaha untuk merawatnya dalam bentuk “toleransi”.

Dalam pembahasan mengenai keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Nusantara, penulis menguraikan beberapa kerajaan yang pernah berjaya di masanya, antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singhasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Kota Kapur, dan lain sebagainya.

Kerajaan Sriwijaya dideskripsikan oleh penulis sebagai kerajaan maritim yang handal menjalin hubungan dengan pedagang luar seperti dari Cina, Arab dan India. Sifat tersebut menunjukkan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan yang terbuka untuk menerima berbagai unsur etnis dari luar. Penulis mendeskripsikan bahwa:

“.....di Sumatra terdapat kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Sriwijaya. Kerajaan yang handal menjalin hubungan dengan dunia internasional melalui jaringan perdagangan dan kemaritimannya. Dalam masa itu pedagang datang dari India, Cina dan Arab untuk meramaikan Sriwijaya.... Bahkan hubungan itu berpengaruh dalam perkembangan budaya pada masa itu, bahkan sampai saat ini pengaruh kebudayaan Cina dan India masih dapat kita temui” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 72).

Uraian di atas menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang membuka diri untuk melakukan kontak dengan berbagai kerajaan, menerima keberadaan etnis lain yang berasal dari berbagai daerah, dan dengan demikian lambat laun terjadi akulturasi budaya. Akulturasi terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 202).

Proses akulturasi menandakan bahwa kerajaan Sriwijaya bersifat terbuka dan menerima perbedaan. Dalam buku teks, penulis ingin menyampaikan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya telah tercipta hubungan yang baik antar berbagai etnis yang pada dasarnya saling menerima perbedaan.

Kontak dagang dan kerjasama dengan berbagai kerajaan bukan hanya dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya, pada masa

selanjutnya yakni masa Kerajaan Majapahit bahkan kerjasama semakin meningkat dengan berbagai kerajaan. Dalam buku teks dideskripsikan oleh penulis bahwa:

“Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Hubungan dengan Siam, Birma, Kamboja, Anam, India, dan Cina berlangsung dengan baik. Dalam membina hubungan dengan luar negeri Majapahit mengenal motto *Mitrea Satata*, artinya negara sahabat” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 136).

Hal demikian mengidentifikasi bahwa Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang terbuka, menerima keberagaman, dan menjalin hubungan harmonis dengan berbagai kerajaan. Menggunakan kata “negara sahabat” secara implisit penulis buku hendak menyampaikan bahwa Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki semangat persaudaraan, dan persahabatan terhadap kerajaan lain. Hal ini juga menunjukkan Kerajaan Majapahit menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme yang terbingkai dalam persahabatan dengan kerajaan lain.

4. Multikulturalisme dalam Agama

Dalam bidang agama diketahui bahwa sebelum pengaruh Islam masuk ke Nusantara terlebih dahulu telah ada agama Hindu dan Budha. Agama ini kemudian diterima oleh masyarakat di berbagai kerajaan ketika itu, bahkan dalam kerajaan Singhasari, Mataram Kuno, dan Majapahit, kedua agama tersebut mengalami sinkretisme menjadi Syiwa-Budha. Kerajaan Tarumanegara dan Kediri adalah kerajaan yang memeluk agama Hindu, sedangkan Kerajaan Sriwijaya diketahui sebagai pemeluk agama Budha, bahkan menurut catatan I-tsing Sriwijaya sebagai pusat agama Budha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Adanya perpaduan kedua agama tersebut (Hindu-Budha) menunjukkan bahwa pada saat itu telah terjadi proses penerimaan berbagai kepercayaan di tengah masyarakat. Hal ini juga menunjukkan

bahwa pada saat itu telah tumbuh penghargaan terhadap masing-masing kepercayaan antara Hindu dan Budha hingga pada akhirnya melahirkan sinkretisme. Dalam buku teks, penulis menjelaskan bahwa:

“Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Budha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang (animisme). Berdasarkan berita dari Fa-Hien, di To-lo-mo (Tarumanegara) terdapat tiga agama, yakni agama Hindu, agama Budha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu... Rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 90).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa di Kerajaan Tarumanegara telah terdapat lebih dari satu kepercayaan, yakni Hindu, Budha, dan pemeluk kepercayaan animisme warisan leluhur. Namun pada bagian akhir penulis menjelaskan bahwa “raja kerajaan memeluk agama Hindu”. Sebagai mana diketahui dalam zaman kerajaan yang feodal apabila seorang raja memeluk suatu kepercayaan maka secara otomatis rakyat kerajaan akan menganut kepercayaan yang dianut oleh raja mereka.

Akan tetapi dari tulisan di atas penulis buku tidak menegaskan mengenai hal tersebut, melainkan penulis buku hanya menerangkan tentang adanya tiga kepercayaan. Penulis tidak menyampaikan mengenai perintah yang dilakukan oleh raja agar rakyat memeluk agama tertentu. Secara implisit dapat dianalisis bahwa penulis buku ingin menegaskan bahwa pada masa kerajaan Tarumanegara telah terdapat raja yang menerima keberagaman dan mempersilahkan kepada rakyatnya untuk memeluk kepercayaan sesuai keyakinan mereka, maksud tersebut kemudian dipertegas oleh kalimat akhir “rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram”.

Kuatnya pengaruh agama Hindu dan Budha dalam sebuah kerajaan

kemudian membuat kedua agama ini mengalami sinkretisme, yakni perpaduan antara dua kepercayaan (Syiwa-Budha). Perpaduan tersebut dijelaskan oleh penulis buku, salah satunya terjadi pada masa Kerajaan Singhasari sebagai berikut:

“Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Budha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu-Budha, menjadi bentuk Syiwa-Budha. Sebagai contoh, berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri penganut aliran Tantrayana” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 130).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa telah berkembangnya agama Hindu dan agama Budha dengan baik, berarti dalam perkembangan kedua agama tersebut tidak terjadi pergesekan, bahkan keduanya saling menerima. Perkembangan yang baik antar keduanya kemudian melahirkan sinkretisme (perpaduan) yang berarti saling menerima dan bersatu antar dua kepercayaan yang berbeda.

Perpaduan tersebut melahirkan aliran Tentrayana yang kemudian dianut oleh Raja Kertanegara pada saat itu. Dari penjelasan di atas penulis buku ingin menyampaikan bahwa pada masa kerajaan Singhasari rakyat hidup rukun dengan kepercayaan yang berbeda yakni Hindu dan Budha. Atas penerimaan dan keterbukaan antara satu dan yang lain menyebabkan kedua kepercayaan ini menyatu, sehingga secara implisit dapat ditangkap dalam uraian di atas penulis buku ingin menyampaikan gagasan keterbukaan, penghargaan serta penerimaan terhadap perbedaan sebagai perwujudan dari kerukunan dalam beragama.

Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara, bahkan kekuasaannya sampai ke Malaysia sekarang. Dalam sistem kepercayaan kerajaan ini juga menganut dua agama yakni Hindu dan Budha. Dalam buku teks dijelaskan oleh penulis bahwa kerajaan ini juga menjunjung tinggi

keberagaman agama, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

“Kehidupan beragama di Majapahit berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu maupun Budha saling bersatu. Pada masa itu pun sudah dikenal semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya sekalipun berbeda-beda baik Hindu maupun Budha pada hakikatnya adalah satu jua. Kemudian secara umum kita artikan berbeda-beda akhirnya satu jua” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 136).

Secara implisit uraian di atas kembali menegaskan bahwa antara agama Hindu dan Budha hidup rukun dan damai, tidak ada pertentangan dan ketegangan antar keduanya. Penegasan atas kerukunan tersebut disampaikan oleh penulis buku pada kata “saling bersatu”. Pada masa kerajaan Majapahit juga berkembang sastra dan budaya, karya sastra yang terkenal adalah kitab *Negarakertagama* yang ditulis oleh Empu Prapanca, dan kitab *Sutasoma* yang ditulis oleh Empu Tantular.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menjadi semboyan bangsa Indonesia adalah istilah yang diadopsi dari kitab *Sutasoma*, semboyan tersebut pada mulanya menyiratkan persatuan dari kedua agama Hindu dan Budha pada masa itu. Atas berdirinya bangsa Indonesia semboyan tersebut digunakan untuk menggaungkan persatuan bangsa yang terdiri dari beragam agama, suku bangsa, ras, dan daerah. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh penulis buku di atas pada dasarnya menitikberatkan pada penyampaian pesan nilai multikulturalisme.

Praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh beberapa kerajaan telah menunjukkan bahwa penghargaan atas perbedaan telah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala, sehingga nilai-nilai tersebut mesti harus diwariskan pada generasi muda Indonesia agar terciptanya tatanan masyarakat yang rukun dan damai.

SIMPULAN

Setelah menganalisis bagian demi bagian buku teks pelajaran Sejarah Indonesia kelas X semester I (pertama) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penulis menemukan beberapa tulisan yang secara implisit menegaskan nilai multikulturalisme. Dalam materi pembelajaran sejarah pesan nilai multikulturalisme disampaikan melalui contoh-contoh peristiwa sejarah.

Materi yang dianalisis dalam tulisan ini berkenaan dengan kehidupan pada masa awal kehidupan manusia di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu Budha. Dari uraian dalam buku teks tersebut terdapat beberapa paragraf yang secara jelas menekankan pada nilai-nilai multikulturalisme. Dalam kajian ini penulis hanya membatasi analisis multikulturalisme dalam bidang agama dan etnis.

Dijelaskan oleh penulis buku bahwa keberadaan agama Hindu dan Budha tidak mengalami pertentangan, melainkan sebaliknya kedua agama ini menyatu menjadi *Syiwa-Budha*. Selain multikulturalisme dalam bidang agama, juga terdapat multikulturalisme dalam bidang etnis. Dijelaskan oleh penulis buku bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari berbagai ras, antara lain Proto Melayu, Deutero Melayu, Melanesia, dan Negrito, oleh sebab itu wajar saja jika dalam negara Indonesia sekarang terdapat berbagai jenis suku dan ras.

REKOMENDASI

Peran generasi muda sekarang adalah merawat dan menjaga perbedaan tersebut agar menjadi kekayaan yang berharga. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam buku teks pelajaran sejarah telah terdapat pesan nilai multikulturalisme melalui contoh-contoh peristiwa sejarah yang relevan.

Melalui tulisan ini penulis mengharapkan nilai-nilai multikulturalisme yang secara implisit telah tertuang dalam buku teks pelajaran sejarah dapat dimanfaatkan dan kemudian dikembangkan oleh guru melalui berbagai strategi

pembelajaran. Diharapkan pula melalui pengembangan tersebut akan terjadi transmisi nilai-nilai yang kemudian akan berdampak pada terciptanya karakter siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme dalam berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertrend, Jacques. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia. Terjemahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Buwono, Sultan Hamengku. (2008). *Merajut Kembali Ke-Indonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Garvey, Brian & Mary Krug. (2015). *Model-model Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah. Terjemahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamad, Ibnu. *Lebih Dekat dengan Analisis Wacana*. Jurnal Mediator, 2005 (8) 2.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Sejarah Indonesia (untuk SMA/MA/SMK kelas X semester I)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, Choirul. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Agus & Darmiasti. (2009). *Historiografi di Indonesia: dari Magis-Religijs hingga Strukturis*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyono, Edi dkk. (2013). *Belajar Hermeneutika*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Poespoprodjo. (1987). *Subjektivitas dalam Historiografi*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- Roosseno, Toeti Heraty N. (2015). *Tentang Manusia Indonesia dsb*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwoko, Herudjati. (2008). *Discoure Analysis: Kajian bagi Semua Orang*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Sobur, Alex. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soyomukti, Nurani. (2015). *Teori-teori Pendidikan: dari Tradisional, (neo) Liberal, Marxis-Sosialis, hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sidhunata (Ed.). (2000). *Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zuhdi, Susanto. (2014). *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.